

INTI SARI

Penelitian hukum ini dibuat untuk merumuskan konsep *judicial statesmanship* dalam persyaratan hakim konstitusi agar sesuai dengan tujuan hukum sekaligus tujuan negara republik Indonesia. Berangkat dari pemikiran supremasi konstitusi yang menempatkan tujuan konstitusi sebagai perwujudan tujuan tertinggi negara, maka hakim konstitusi sebagai personifikasi lembaga yang memiliki fungsi penafsir dan penjaga nilai-nilai konstitusi harus disaring sesuai dengan kriteria yang sejalan dengan tujuan tersebut. Sehingga perlu ditelisik lebih mendalam pengaturan mengenai perekrutan hakim konstitusi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian normatif yang didasarkan pada data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif secara deskripsi analitis. Berdasarkan analisis yang dilakukan, peraturan perundang-undangan di Indonesia belum menegaskan secara tersurat terkait *judicial statesmanship*, namun setelah ditelusuri terdapat beberapa karakter yang mirip dengan konsep *judicial statesmanship* tersebut. Hal ini penting, mengingat tujuan yang ingin dibangun oleh *judicial statesmanship* sejalan dengan tujuan konstitusi. Namun perlu adanya elaborasi karakter konsep *judicial statesmanship* ke dalam pengaturan yang berlaku, mencakup karakter *judicial courage*, *moderate*, *prudence/prudential wisdom*, *integrity*, dan *a good man or woman*.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *Judicial Statesmanship*, Akuntabilitas

ABSTRACT

*This legal research intends to determine concept of judicial statesmanship for preconditions of constitutional court of judge according to purpose of law and the Republic of Indonesia's idea. Based on constitution supremacy, the purpose of constitution to reach highest goals of states, constitutional judge as personification of constitutional court that has functions as the interpreter of constitution and the guardian of constitution, must be selected according to some qualifications in accordance to those goals. Thus, it's essential to investigate constitutional judge's recruitment in the Indonesian law. A writer used a normative research method, normative research is a research that focused on analysing legal materials that is consist of secondary data. Secondary data divided into three kinds of legal material: primary, secondary, and tertiary legal materials. Data processed and analysed using descriptive method. Research result shows that: 1) Indonesian's laws weren't determine in the norm of *expressis verbis* of judicial statesmanship, however, by digging into it, it found that some qualities of judicial statesmanship have similar character with those laws. It's essential for the purpose of judicial statesmanship that have as same as purpose of Indonesian's constitution. Nevertheless, the qualities of judicial statesmanship should be elaborated with valid legislations, like judicial courage, moderate, prudence/prudential wisdom, integrity, and a good man or woman.*

Keywords: Constitutional Court, Judicial Statesmanship, Accountability